



SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN  
**SNP 7**  
2019



# SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

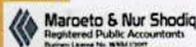
"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan Pajak"



JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
BANGKALAN, 16-17 OKTOBER 2019

Media Partner :

Supported by :



**SAMBUTAN**

**KETUA PANITIA SNP VII**

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti Seminar Nasional Perpajakan VII.

Yang kami hormati Bapak Darussalam (Managing Partner DDTC) dan Bapak HestuYoga Saksama (Direktur KP2Humas DJP) selaku Keynote Speakers, yang kami hormati: Bapak Bawono Kristiaji, Ibu Christine Tjen, Bapak Doni Budiono selaku pembicara di hari pertama, yang kami hormati Bapak Heru Tjaraka, Ibu Ela Firastin selaku pembicara di hari kedua dan hadirin peserta seminar yang berbahagia.

Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir disini. Seminar kita hari ini mengambil topik Reformasi Perpajakan; Upaya mendorong daya saing dan memobilisasi penerimaan dan seminar ini diperuntukkan bagi para praktisi, akademisi, dan birokrasi sebagai bagian dari pemecahan masalah di lingkungan birokrasi dan masyarakat maupun yang dilakukan oleh para akademisi sebagai bagian pengembangan ilmu dibidang perpajakan.

Tujuan seminar ini adalah;

**SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER**

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"

Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

- Forum komunikasi yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan sinergi antar akademisi, praktisi, aparatur, pengamat, dan pemerhati perpajakan tentang perkembangan ilmu dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia.
- Sarana mendukung dan mendorong ide-ide, konsep, dan pengalaman yang dinamis, inovatif, dan kreatif dibidang perpajakan.
- Forum sosialisasi/diseminasi tentang regulasi, kajian, serta hasil penelitian dibidang perpajakan.

Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Aamin Ya Rabbal Alamin

Wassalamuallikum Wr. Wb

Nurhayati

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

## SUSUNAN ACARA SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN VII 16 -17 OKT 2019

WAKTU	ACARA	TEMPAT
16 Okt 2019 07.30-08.30	<b>REGISTRASI PESERTA</b>	Ruang Registrasi Graha Utama Lt. 10
16 Okt 2019 08.30-09.30	<b>PEMBUKAAN</b> a. Pembukaan b. Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars UTM c. Sambutan dan Pembukaan Acara - Rektor UTM d. Penandatanganan MoU, UTM dengan DDTC e. Penyerahan Cenderamata f. Do'a	Ruang Seminar Graha Utama Lt. 10
16 Okt 2019 09.30-09.45	<b>HIBURAN</b>	Ruang Seminar Graha Utama Lt. 10
16 Okt 2019 09.45-10.15	<b>KEYNOTE SPEECH :</b> • Hestu Yoga Saksama - Direktur KP2Humas DJP • Darussalam - Managing Partner DDTC	Ruang Seminar Graha Utama Lt. 10
16 Okt 2019 10.15-11.45	<b>PEMBICARA SESI PANEL:</b> 1. B. Bawono Kristiaji (Reformasi Perpajakan dan Posisi Perpajakan Indonesia di Dunia Internasional) 2. Christine Tjen (Reformasi Perpajakan: Tinjauan Aspek Riset dan Pengembangan Keilmuan Perpajakan) 3. Do ni Budiono (Peran dan Peluang Praktisi Pajak dalam Menghadapi Era Keterbukaan Informasi Perpajakan)	Ruang Seminar Graha Utama Lt. 10

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

16 Okt 2019 12.00-13.00	<b>ISHOMA</b> Sholat Makan Siang Akustik	RKB H Lt. 2 RKB H 1.4 dan 1.5 RKB H 1.4
16 Okt 2019 13.00-14.30	<b>SESI PARALEL</b>	RKB H
16 Okt 2019 13.00-14.30	<b>FORUM TAX CENTER</b> a. Pengantar dari Tax Center UTM b. Arahan dari Kepala Kanwil DJP Jatim 2 c. Forum d. Penutup	RKB H Lt. 2
16 Okt 2019 14.30-16.00	<b>EKSPLORASI EKONOMI KREATI LOKAL MADURA</b> a. Bukit Jeddih b. Wisata Lokal, Cinderamata dan Makan Malam	Desa Jeddih Burneh
17 Okt 2019 07.30-08.00	<b>REGISTRASI PESERTA</b>	RKB H 1.1 dan 1.2
17 Okt 2019 08.00-09.45	<b>PEMBICARA:</b> 1. Dr. Heru Tjaraka (Kompetensi Lulusan Prodi Akuntansi yang dibutuhkan untuk Memenuhi Kebutuhan Praktisi Perpajakan di Dunia Kerja) 2. Ela Firastin (Kompetensi Lulusan Prodi Akuntansi yang dibutuhkan untuk Memenuhi Kebutuhan Praktisi Perpajakan di Dunia Kerja)	RKB H Ruang 1.1 dan 1.2
17 Okt 2019 10.00-10.15	<b>COFFE BREAK</b>	RKB H 1.4
17 Okt 2019 10.15-11.30	<b>SESI PARALEL 1</b>	
17 Okt 2019 11.30-12.30	<b>ISHOMA</b> Sholat Makan Akustik	RKB H Lt. 2 RKB H 1.4 dan 1.5 RKB H 1.4

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

17 Okt 2019 12.30-14.00	<b>COFFE BREAK</b>	
17 Okt 2019 14.15-14.30	<b>SESI PARALEL 2</b>	RKB H 1.4
17 Okt 2019 14.00-16.00	<b>PENUTUP</b> a. Sambutan Ketua Panitia b. Penutup & Pengumuman Paper Terbaik	RKB H Ruang 1.1 dan 1.2

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

**JADWAL SESI PANEL  
SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN VII  
16-17 OKT 2019**

No	Nama Pemakalah	Instansi	Judul Paper	Reviewer & Discussant	Tgl Pukul	Ruang
1	Kautsar Riza Salman dan Arif Z. Djunaedi	STIE Perbanas Surabaya	Peran Tata Kelola Islami Untuk Mengurangi Tingkat Agresivitas Pajak Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dalam Rangka Menguji Teori Keagenan	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.6
2	Muhammad Dimas Abidin, Afifudin dan Junaidi	Universitas Islam Malang	Analisis Penerapan Witholding Tax System Dalam Perspektif Mutatis Mutandis Pada Lembaga Keuangan Syariah	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.6
3	Greska Redielano Ramadan dan Abdullah Mujaddid	Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Muhammadiyah Gresik	Faktor Religiusitas Dalam Membayar Pajak Dan Zakat	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.6
4	Noor Safrina, Akhmad Soehartono dan Aura Asrina Savitri	Politeknik Negeri Banjarmasin, KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Manado	"Menjaga Marwah" Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.6
1	Yanis Ulul Az'mi dan Wiwin Wahyuni	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Pemahaman Wajib Pajak Pelaku E-Commerce Terhadap Kewajiban Perpajakannya	Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE., CFA., CPA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.7

**SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER**

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

**SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER**

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

2	Sari Dewi dan Dekar Urumsah	Universitas Islam Indonesia	Determinan Faktor yang Mempengaruhi Niat Pembayaran Pajak Pelaku E-Commerce: Konseptual Model	Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE., CFA., CPA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.7
3	Dalilah Sukma dan Nur Sayidah	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	Pengaruh Pengetahuan E-Filing Dan Pemanfaatan E-Filing Terhadap Kepatuhan WPOP	Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE., CFA., CPA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.7
4	Lilis Endang W., Fran Sayekti dan Siti Resmi	Universitas Teknologi Yogyakarta dan STIM YKPN	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi User Terhadap Kinerja E-Billing	Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE., CFA., CPA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.7
1	Anita Ludia Vivian Wauran	Politeknik Negeri Manado	Model Akuntansi dan Pajak Bagi UMKM Berdasarkan SAK EMKM dan PP NO 23 Tahun 2018	Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CIA., QIA., CFA., BKP	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.3
2	Safitri dan Diana Rahmawati	Universitas Negeri Yogyakarta	Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Penetapan PPh Final Sesuai PP. No. 23 Tahun 2018	Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CIA., QIA., CFA., BKP	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.3
3	Moh Sohefuddin, Evi Malia dan Imam Agus Faisol	Universitas Islam Madura	Evaluasi Pengenaan Pajak Umkm Sebelum Dan Sesudah Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CIA., QIA., CFA., BKP	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.3
4	Ida Ni'matul Aini dan Muhammad Syam Kusufi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Analisis Faktor Yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Wajib Pajak Umkm Yang Ada Di Kabupaten Bangkalan)	Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CIA., QIA., CFA., BKP	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.3
1	Yuanda Prameswara dan Priyo Hari Adi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Hubungan Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perencanaan Pajak	Dr. Nur Hayati, S.E., M.SA., Ak., QIA., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.2

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

2	Gus Mukhlas dan Priyo Hari Adi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Dr. Nur Hayati, S.E., M.SA., Ak., QIA., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.2
3	Muchamad Reza Triwijaya dan Setia Budi Kurniawan	Universitas Merdeka Malang	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Koneksi Politik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Dr. Nur Hayati, S.E., M.SA., Ak., QIA., CA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.2
1	Supriyati dan Nadiyah Sagitamamah	STIE Perbanas Surabaya	Corporate Tax Aggressiveness: Pemicu Peningkatan Perekonomian Sektor Perbankan Di Asia Tenggara	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.1
2	Hidayatul A W dan Dewi Prastiwi	Universitas Negeri Surabaya	Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Intensitas Modal Dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.1
3	Maya Anwar dan Gita Arasy Harwida	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	The Effect Of Financial Performance On Tax Aggressiveness (Empirical Study Of Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock Exchange (BEI) In 2014-2017)	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.1
4	Dwi Astutik dan Lintang Venusita	Universitas Negeri Surabaya	Pengaruh Karakteristik Demografis CEO Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Keluarga	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFA	16 Okt 2019 (13.00-14.30)	1.1

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

17 Okt 2019 (Sesi 1)						
1	Bayu Adi dan Moh Afrizal Miradji	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Analisis Pertimbangan Dalam Aspek CSR Terhadap Insentif Pajak PT Maspion III Di Sidoarjo Jawa Timur (Sebuah Studi Empiris Tentang CSR Di PT. Maspion III Sidoarjo)	Alexander Anggono, SE., M.Si.,PhD., CFrA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.6
2	Arwaly Haifa Salsabila, Dianwicakasih Arieftiara dan Ni Putu Eka Widiastuti	Universitas Pembangunan Nasional Jakarta	Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance	Alexander Anggono, SE., M.Si.,PhD., CFrA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.6
1	Taufik Kurachman dan M. Taufiq Budiarto	Kementerian Keuangan dan Widyaistwara Ahli Madya	Kesiapan Wajib Pajak Dalam Mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 Dibidang Perpajakan	Dr. Prasetyono, S.E.,M.Si., CFrA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.7
2	Muhammad Azmi Akbar dan Mahmudi	Universitas Islam Indonesia	Analisis Antaseden Dan Kosekuen Penerimaan Pajak Di Negara AEOI (Automatic Exchange Of Information)	Dr. Prasetyono, S.E.,M.Si., CFrA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.7
1	Razif dan Ratu Iche Wijaya	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Menurut PP No.23 Tahun 2018	Dr. Tarjo, S.E., M.Si.,CFE., CFrA., CPA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.3
2	Tita Rusdiana dan Gita Arasy Harwida	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bangkalan	Dr. Tarjo, S.E., M.Si.,CFE., CFrA., CPA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.3
1	Hanum Bani Latifah dan Made Dudy S.	Universitas Negeri Surabaya	Perilaku Agresivitas Pajak Korporasi Di Indonesia Dalam	Dr. Bambang Haryadi,	17 Okt 2019 (10.15	1.2

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

			Perspektif Kinerja Keuangan Dan Tata Kelola Perusahaan	S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	- 11.30)	
2	Winda Febriyanti, Eko Arief Sudaryono dan Wahyu Widarjo	Universitas Sebelas Maret	Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional Dan Nilai Perusahaan	Dr. Bambang Haryadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.2
1	Indra Pahala, Tresno Eka Jaya dan Risa Syaputriani	Universitas Negeri Jakarta	Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Besarnya PPh Badan	Dr. Nur Hayati, S.E., M.SA., Ak., QIA., CA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.1
2	Febri Budi Utomo dan Fariyana Kusumawati	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba	Dr. Nur Hayati, S.E., M.SA., Ak., QIA., CA	17 Okt 2019 (10.15 - 11.30)	1.1
17 Okt 2019 (Sesi 2)						
1	Anton, Maria Andriani dan Monica Laili	Universitas Nasional Karangturi Semarang	Analisis Moral Kognitif Dalam Keputusan Dilema Moral : Kepatuhan Pajak Di Dalam Iklim Synergistic Dan Antagonistic	Alexander Anggono, SE., M.Si.,PhD., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.6
2	Mira Pramudianti dan Erna Hendrawati	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Preferensi Resiko, Dominasi Dan Hubungan Profesional Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Surabaya)	Alexander Anggono, SE., M.Si.,PhD., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.6

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

3	Indra Pahala, Tresno Eka Jaya dan Tri Linda S.	Universitas Negeri Jakarta	Pengaruh Pemanfaatan Tax Havens, Whothlding Taxes Dan Multinationality, Terhadap Praktik Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia	Alexander Anggono, SE., M.Si., Ph.D., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.6
4	Hasaniyatun dan M Asyim Asyari	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Desa Marengan Laok	Alexander Anggono, SE., M.Si., Ph.D., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.6
1	Aniek Juliarini dan Ariefina Sri Indaryani	Balai Diklat Kementerian Keuangan Yogyakarta	Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia	Dr. Bambang Haryadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.7
2	Kartika Putri Kumalasari, Astri Warih Anjarwi dan Diana Khaira Ernengsih	Universitas Brawijaya	Perspektif Bea Cukai: Implementasi Program Sinergi Joint Analysis Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Kepatuhan Dan Peningkatan Pendapatan Negara Di Indonesia	Dr. Bambang Haryadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.7
3	Irsan Aidil Akbar dan Diana Rahmawati	Universitas Negeri Yogyakarta	The Tax Administration Games Sebagai Media Pembelajaran PPh Pasal 21 Di Smkn 7 Yogyakarta	Dr. Bambang Haryadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.7
4	Richa Ramadayant dan Muhammad Syam Kusufi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Pengaruh Tarif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Saat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di KPP Pratama Bojonegoro)	Dr. Bambang Haryadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.7

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

1	Septian Bayu Kristanto, Herni Kurniawati dan Yuni Rimawati	Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Tarumanagara dan Universitas Trunojoyo	The Obstacles And Potential Solutions For Msme Entrepreneurs In Indonesia	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.3
2	Mutia Indriana, Norsain dan Moh. Faisol	Universitas Wiraraja Sumenep	Tarif Pajak UMKM 0,5%: Reward Or Punishment? (Studi Pada KPP Pratama Pamekasan)	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.3
3	Nurul Hanifah dan M Asyim Asyari	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Potret Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Bangkalan	Dr. Rita Yuliana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.3
1	Didik Tri Wibowo dan Muhammad Syafiqurrahman	Universitas Sebelas Maret	Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance	Dr. Prasetyono, S.E., M.Si., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.2
2	Trisnik Ratih Wulandari, Juliat dan Arum Kusumaningdyah Adiaty	Universitas Sebelas Maret	Preferensi Risiko Eksekutif, Komposisi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Perusahaan Multinasional Dan Penghindaran Pajak	Dr. Prasetyono, S.E., M.Si., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.2
3	Nur Dzat Ummu Kholila, Arum Kusumaningdyah Adiaty, Juliat dan Trisnik Ratih Wulandari	Universitas Sebelas Maret	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)	Dr. Prasetyono, S.E., M.Si., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.2
4	Arwaly Haifa Salsabila, Dian Wicakshih	Universitas Pembangunan	Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Penghindan	Dr. Prasetyono, S.E., M.Si., CFrA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.2

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

	Arieftiara dan Ni Putu Eka	Nasional Jakarta	Pajak Pada Perusahaan Jasa Go Public Di Indonesia Tahun 2016-2018			
1	I Nyoman Putra Yasa, Sunitha Devi, Edy Sujana dan I Putu Hendra	Universitas Pendidikan Ganesha	Relevansi Sliperry Slope Theory Ditinjau Dari Perspektif Genden Wajib Pajak	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.1
2	Kiki Fatmawati dan Gita Arasy Harwida	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bangkalan	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.1
3	Hariri, Junaidi dan Umi Nadiroh	Universitas Islam Malang	Peran Tax Center Unisma Sebagai Konsultan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.1
4	Hermawan Budi Prasetya, Dina Alafi Hidayatin dan Hendra Fatkhur Rohman	STIE Cendekia Bojonegoro	Tax Planning Pph Pasal 21 Di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan	Prof. Dr. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA	17 Okt 2019 (12.30-14.00)	1.1

## PERAN TATA KELOLA ISLAMI UNTUK MENGURANGI TINGKAT AGRESIVITAS PAJAK PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGUJI TEORI KEAGENAN

KAUTSAR RIZA SALMAN<sup>1</sup>

ARIF Z. DJUNAEDI<sup>2</sup>

STIE Perbanas Surabaya <sup>1</sup>[kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id), <sup>2</sup>[arif.zeinfiki@perbanas.ac.id](mailto:arif.zeinfiki@perbanas.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian seputar tata kelola Islami masih relatif sedikit dibahas karena sebagian besar penelitian masih menggunakan tata kelola konvensional. Salah satu organ penting dalam mekanisme tata kelola Islami adalah keberadaan dewan pengawas syariah. Kebaruan yang ditawarkan dari studi ini adalah penggunaan tata kelola Islami sebagai determinan yang diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Selain itu, belum ada studi empiris yang menguji bagaimana pengaruh tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini merupakan orisinalitas yang ditawarkan dari studi ini yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak dengan menggunakan dasar teori keagenan (agency theory). Objek penelitian adalah bank syariah yang telah berstatus sebagai bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin baik implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat berdampak pada menurunnya tingkat agresivitas pajak dari bank syariah. Temuan penelitian ini berhasil mengkonfirmasi peran teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh tingkat tata kelola Islami.

**Kata kunci:** tingkat tata kelola Islami, tingkat agresivitas pajak, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

## SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN (SNP) VII & CALL FOR PAPER

"Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan"  
Bangkalan, 16-17 Oktober 2019

**Peran Tata Kelola Islami untuk Mengurangi Tingkat Agresivitas Pajak  
pada Bank Umum Syariah di Indonesia Dalam Rangka Menguji Teori Keagenan**

oleh:

Kautsar Riza Salman  
STIE Perbanas Surabaya  
[kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id)

Arif Z. Djunaedi  
STIE Perbanas Surabaya  
[arif.zeinfiki@perbanas.ac.id](mailto:arif.zeinfiki@perbanas.ac.id)

Abstrak

*Penelitian seputar tata kelola Islami masih relatif sedikit dibahas karena sebagian besar penelitian masih menggunakan tata kelola konvensional. Salah satu organ penting dalam mekanisme tata kelola Islami adalah keberadaan dewan pengawas syariah. Kebaruan yang ditawarkan dari studi ini adalah penggunaan tata kelola Islami sebagai determinan yang diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Selain itu, belum ada studi empiris yang menguji bagaimana pengaruh tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini merupakan orisinalitas yang ditawarkan dari studi ini yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak dengan menggunakan dasar teori keagenan (agency theory). Objek penelitian adalah bank syariah yang telah berstatus sebagai bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin baik implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat berdampak pada menurunnya tingkat agresivitas pajak dari bank syariah. Temuan penelitian ini berhasil mengkonfirmasi peran teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh tingkat tata kelola Islami.*

***Keywords: tingkat tata kelola Islami, tingkat agresivitas pajak, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan***

**Pendahuluan**

Praktik agresivitas pajak dilakukan wajib pajak bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan, atau dengan kata lain mengurangi transfer kekayaan dari perusahaan dan pemegang saham kepada pemerintah sehingga hal ini dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham (*shareholder*). Menurut Chen dkk. (2010), praktik agresivitas pajak dapat meliputi praktik legal maupun illegal. Praktik legal diperbolehkan menurut Undang-Undang melalui pemanfaatan celah (*loophole*) dari peraturan perpajakan yang ada atau yang biasa diistilahkan dengan wilayah abu-abu (*grey area*). Praktik agresivitas pajak yang illegal tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan pajak yang ada. Praktik agresivitas pajak yang illegal tersebut biasa diistilahkan dengan *tax evasion*.

Agresivitas pajak dapat dijelaskan dari sudut pandang kerangka teori keagenan (*agency theory framework*). Praktik agresivitas pajak melibatkan hubungan antara manajer dengan pemegang saham (*shareholder*). Desai & Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa manajer melakukan agresivitas pajak untuk kepentingan mereka sendiri (*self interest*)

dibandingkan untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder interest*). Sebaliknya pemegang saham (*shareholder*) tidak menginginkan praktik agresivitas pajak karena praktik ini dapat menimbulkan biaya yang secara langsung (*direct cost*) berkaitan dengan aktivitas agresivitas pajak seperti biaya yang timbul untuk perencanaan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda dari fiskus. Pemegang saham juga menilai bahwa agresivitas pajak dapat mengakibatkan sanksi moral dari masyarakat.

Tata kelola secara umum merupakan suatu sistem pengelolaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan, melindungi para pemangku (*stakeholder*) yang beragam, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika secara umum (Kholid & Bachtiar, 2015). Di dalam tata kelola Islami, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah sesuatu yang membedakan dari tata kelola secara umum. Salah satu organ penting dalam tata kelola Islami adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk mengawasi pengelolaan entitas syariah untuk menjamin kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, manajemen bank syariah diharapkan tidak melakukan pelanggaran kontrak dengan nasabah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara maksimal dan dapat meningkatkan kinerjanya (Kholid & Bachtiar, 2015).

Berdasarkan teori keagenan, mekanisme tata kelola yang baik dapat berperan untuk memonitoring perilaku oportunistik agen (Chrisman dkk., 2007). Dalam konteks pajak, mekanisme tata kelola yang baik dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dalam meminimalkan beban pajak penghasilan. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola terhadap agresivitas pajak sebagaimana studi Lanis & Richardson (2011); Cheng dkk. (2012); Badertscher dkk. (2013); Sartaji & Hassanzadeh (2014); serta Hadi & Mangoting (2014). Kelemahan dari studi-studi sebelumnya adalah belum terdapat studi yang secara khusus menguji pengaruh tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal inilah yang menjadi motivasi penting dilakukan penelitian saat ini.

Kebaruan yang ditawarkan dari studi ini adalah terletak pada model penelitian, indikator dan objek penelitian. Model yang dikembangkan studi ini adalah relatif baru yaitu model baru yang menguji pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Studi ini juga menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Selain itu, objek penelitian dari studi ini adalah bank umum syariah di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah tingkat tata kelola Islami berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## **Rerangka Teoritis**

### *Teori Keagenan*

Teori dasar yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori ini telah banyak digunakan dalam bidang akuntansi dan manajemen. Secara umum, teori ini menguraikan hubungan antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Teori ini menyatakan bahwa agen akan berperilaku yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Dengan demikian, prinsipal akan menerapkan mekanisme struktural yang memantau agen dalam rangka untuk mengendalikan perilaku oportunistik dari agen dan menyelenggarakan kepentingan semua pihak secara lebih baik (Fama & Jensen, 1983; Eisenhardt, 1989).

Teori keagenan menjelaskan adanya dua pilihan bagi prinsipal untuk mengurangi masalah keagenan dengan mengekang perilaku oportunistik agen (Eisenhardt, 1989). Cara pertama adalah menciptakan struktur tata kelola yang memungkinkan monitoring dan

penilaian perilaku sebenarnya dari agen (Anderson & Reeb, 2004; Chrisman dkk., 2007). Struktur tata kelola ini meliputi prosedur pelaporan, manajemen tambahan atau dewan direksi (Donaldson & Davis, 1991). Cara kedua adalah menciptakan struktur tata kelola dimana kontrak didasarkan pada hasil aktual dari perilaku agen (Eisenhardt, 1989). Contoh dari jenis ini adalah gaji dalam bentuk insentif, dimana gaji diberikan sebagai insentif untuk agen yang berkinerja tinggi (Chrisman dkk., 2007). Risiko dipindahkan ke agen dan cara ini dapat menciptakan motivasi bagi agen untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal (Davis dkk., 1997; Eisenhardt, 1989). Intinya dari kedua cara ini, prinsipal dapat membuat pilihan antara membangun struktur tata kelola yang didasarkan pada perilaku sebenarnya agen atau hasil dari perilaku tersebut (Eisenhardt, 1989). Kedua pilihan tersebut sama-sama menghasilkan biaya keagenan yang harus ditanggung oleh prinsipal untuk memantau dan menilai perilaku agen.

### **Hipotesis**

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola Islami dan agresivitas pajak. Dalam teori keagenan (*agency theory*) dinyatakan bahwa struktur tata kelola memungkinkan monitoring untuk mengendalikan perilaku oportunistik agen (Eisenhardt, 1989; Anderson & Reeb, 2004; Chrisman dkk., 2007). Dalam konteks penelitian ini, tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat berperan sebagai media yang efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik dari wajib pajak. Hal ini berdampak pada menurunnya agresivitas pajak dari wajib pajak yang diindikasikan dengan meningkatnya pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak.

Studi mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Khaoula & Ali (2012); Hanum & Zulaikha (2013); Zemzem & Ftouhi (2013); serta Richardson, Taylor, & Lanis (2013); serta Boussaidi & Hamed (2015). Studi Boussaidi & Hamed (2015) menemukan bahwa (1) diversitas gender dalam dewan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR); dan (2) meningkatnya konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap ETR. Sampel dari studi Boussaidi & Hamed (2015) adalah 39 perusahaan yang terdaftar di Tunisian Stock Exchange (TSE) pada periode 2006-2012. Studi Zemzem & Ftouhi (2013) mendukung temuan studi Boussaidi & Hamed (2015) yaitu ukuran dewan dan persentase wanita dalam dewan menurunkan tingkat agresivitas pajak. Studi Zemzem & Ftouhi (2013) menggunakan sampel 73 perusahaan di Prancis selama tahun 2006-2010. Studi lain dari Richardson, Taylor, & Lanis (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan direksi pada agresivitas pajak dengan menggunakan sampel 203 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Australia pada periode 2006-2009. Temuan studi Richardson, Taylor, & Lanis (2013) adalah adanya pengaruh interaksi antara komposisi dewan direksi, penerapan sistem manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak.

Sebaliknya studi Hanum & Zulaikha (2013) tidak menemukan adanya pengaruh ketiga karakteristik tata kelola (komisaris independen, komite audit, dan pemegang saham institusional) terhadap tingkat agresivitas pajak. Sampel dari studi Hanum & Zulaikha (2013) adalah 50 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2011. Senada dengan studi Hanum & Zulaikha (2013), studi Khaoula & Ali (2012) yang menggunakan sampel 300 perusahaan yang tergabung dalam S&P 500 selama periode 1996-2009 membuktikan secara empiris bahwa ukuran dewan dan diversitas gender dalam dewan tidak mempunyai pengaruh pada aktivitas perencanaan pajak perusahaan.

H<sub>1</sub>: Tingkat Tata Kelola Islami berpengaruh terhadap Tingkat Agresivitas Pajak

## **Metode Penelitian**

### *Desain Penelitian*

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebagaimana dijelaskan Berete (2011) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menguji teori dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, Berete (2011) juga menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif mengandalkan pada pengumpulan dan analisis data numerik. Demikian pula, Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk menguji sifat hubungan, atau perbedaan antar kelompok, atau independensi variabel dalam situasi tertentu.

### *Populasi dan Sampel*

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Entitas bank syariah digunakan dalam penelitian ini karena bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas bank konvensional dalam hal: (1) praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dimana salah satu organ dari tata kelola Islami adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; (2) tujuan bank syariah tidak hanya memaksimalkan laba tetapi juga memaksimalkan kinerja non keuangan dan kepentingan publik; (3) tingkat rasio kewajiban dan penghasilan non halal yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional; dan (4) masih relatif sedikit penelitian sebelumnya yang menganalisis tingkat agresivitas pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui website Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan website masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) berupa laporan keuangan (*financial statement*), laporan tahunan (*annual report*), laporan *good corporate governance* (GCG) dan laporan *corporate social responsibility* (CSR). Jumlah seluruh BUS di Indonesia adalah 11 (sebelas) bank umum syariah (BUS). Periode penelitian adalah 7 (tujuh) tahun 2010-2016. Periode penelitian dipilih mulai tahun 2010 karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang GCG untuk Entitas Syariah mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010.

### *Model Penelitian*

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$ETR_t = \alpha_0 + \beta_1 IG_t + e$$

Keterangan:

$ETR_t$  = tarif pajak efektif (*effective tax rate*) pada tahun  $t$

$IG_t$  = tingkat tata kelola Islami pada tahun  $t$

### *Deskripsi Variabel dan Indikator*

1. Yang dimaksud dengan Tingkat Tata Kelola Islami (*Islamic Governance*) dalam penelitian ini adalah tingkat sejauh mana tata kelola yang dilakukan entitas syariah sesuai dengan syariah Islam. Variabel Tingkat Tata Kelola Islami diukur dengan 11 indikator yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku mulai efektif tanggal 1 Januari 2010. Sebelas indikator tersebut meliputi: 11 (sebelas) indikator, yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ( $X_{1.1}$ ); Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ( $X_{1.2}$ ); Kelengkapan dan pelaksanaan

tugas Komite (X<sub>1.3</sub>); Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (X<sub>1.4</sub>); Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (X<sub>1.5</sub>); Penanganan benturan kepentingan (X<sub>1.6</sub>); Penerapan fungsi kepatuhan Bank (X<sub>1.7</sub>); Penerapan fungsi audit intern (X<sub>1.8</sub>); Penerapan fungsi audit ekstern (X<sub>1.9</sub>); Batas Maksimum Penyaluran Dana (X<sub>1.10</sub>); dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (X<sub>1.11</sub>). Semakin tinggi skor tingkat tata kelola Islami menunjukkan implementasi tata kelola Islami yang kurang baik, sebaliknya semakin rendah skor tingkat tata kelola Islami menunjukkan implementasi tata kelola Islami yang semakin baik.

Dalam menyusun self assessment, dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria atau indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditetapkan peringkat dari masing-masing kriteria atau indikator tersebut. Kriteria peringkat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- b. Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- c. Peringkat 3: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- d. Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- e. Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Penelitian ini menggunakan 11 indikator *internal self assessment* untuk mengukur variabel Tingkat Tata Kelola Islami. *Internal self assessment* kemungkinan memiliki subjektivitas dalam proses penilaiannya, tetapi penilaian ini dipandang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a. Terdapat acuan atau pedoman yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - b. Laporan pelaksanaan GCG secara internal self assessment merupakan kewajiban bank syariah yang harus disampaikan kepada stakeholder dan mendorong stakeholder untuk melakukan check and balance. Selain itu, laporan pelaksanaan GCG juga wajib disampaikan ke Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat di Indonesia, dan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas).
  - c. Kewajiban melaksanakan self assessment ini dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan secara komprehensif dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG.
  - d. Proses penyusunan self assessment dilakukan dengan menggunakan kertas kerja self assessment yang telah diatur dalam Surat Edaran 12/13/DPbS.
2. Yang dimaksud dengan tingkat agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah level dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak (tax planning) serta menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai penggelapan pajak (Frank dkk.,

2009). Dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) indikator untuk mengukur variabel agresivitas pajak yaitu *Current Tax Expense* ( $Y_{1.1}$ ), *Tax Expense* ( $Y_{1.2}$ ), *GAAP effective tax rate* ( $Y_{1.3}$ ), *Cash effective tax rate* ( $Y_{1.4}$ ), dan *Fiscal effective tax rate* ( $Y_{1.5}$ ). Semakin tinggi beban pajak dan tarif pajak efektif mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang rendah.

## Analisis dan Pembahasan

### *Populasi dan Sampel Penelitian*

Subyek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang berkedudukan di Indonesia yang meliputi: Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Maybank Syariah Indonesia. Sebelas bank umum syariah (BUS) di Indonesia menjadi sampel dalam penelitian ini karena (1) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) menerbitkan laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) periode 2010-2016; (2) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) menerbitkan laporan tata kelola (*good corporate governance*) periode 2010-2016; (3) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) memiliki informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; dan (4) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) memiliki data tentang laba fiskal, laba akuntansi, beban pajak, dan beban pajak kini.

### *Deskripsi Variabel Tingkat Tata Kelola Islami*

Statistik deskriptif mengenai variabel Tingkat Tata Kelola Islami disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Tata Kelola Islami

Indikator	n	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X <sub>2.1</sub>	77	0,125	0,5	0,1897	0,0765
X <sub>2.2</sub>	77	0,175	0,53	0,2781	0,1139
X <sub>2.3</sub>	77	0,1	0,3	0,1897	0,0527
X <sub>2.4</sub>	77	0,1	0,3	0,1684	0,0539
X <sub>2.5</sub>	77	0,05	0,15	0,0919	0,0255
X <sub>2.6</sub>	77	0,1	0,41	0,1795	0,0634
X <sub>2.7</sub>	77	0,05	0,15	0,091	0,0275
X <sub>2.8</sub>	77	0,05	0,15	0,0984	0,0215
X <sub>2.9</sub>	77	0,05	0,135	0,0675	0,0245
X <sub>2.10</sub>	77	0,05	0,22	0,0802	0,0345
X <sub>2.11</sub>	77	0,15	0,45	0,2807	0,0766

Indikator pertama dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X<sub>2.1</sub>) adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Indikator X<sub>2.1</sub> nilai minimum sebesar 0,1250, nilai maksimum sebesar 0,5, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,1897. Semakin rendah skor dari indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris semakin baik di bank syariah. Bank Mega Syariah memperoleh nilai minimum sebesar 0,125 yang menunjukkan kinerja terbaik dari Dewan Komisaris pada tahun 2010, 2011, 2012, 2014, dan 2015. Bank Muamalat memperoleh skor sebesar 0,125 secara berturut-turut pada periode 2010-2014. Bank BNI secara berturut-turut selama periode 2010-2016 memperoleh skor sebesar 0,125 kecuali di tahun 2016. Adapun skor sebesar 0,5

diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2012 yang menunjukkan kinerja terendah dari seluruh bank syariah pada periode 2010-2016.

Indikator kedua dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.2}$ ) adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Indikator  $X_{2.2}$  nilai minimum sebesar 0,175, nilai maksimum sebesar 0,53, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,2781. Skor yang lebih kecil menunjukkan kinerja Direksi yang semakin baik dalam hal tugas dan tanggung jawabnya. Skor minimum sebesar 0,175 diperoleh Bank Muamalat Indonesia (BM) pada tahun 2010-2015; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, 2011, 2015, dan 2016; Bank Victoria Syariah pada tahun 2010 dan 2013; Bank BRI Syariah pada tahun 2011-2013; Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2015; Bank Mega Syariah pada tahun 2012 dan 2014; Bank Panin Syariah pada 2012-2016. Adapun skor maksimum sebesar 0,5300 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010-2012, Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012, Maybank Syariah pada tahun 2013-2014. Sejak tahun 2015, tidak ada bank syariah memperoleh skor sebesar 0,53 sehingga menunjukkan secara umum bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator ketiga dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.3}$ ) adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. Indikator  $X_{2.3}$  memiliki nilai minimum sebesar 0,1000, nilai maksimum sebesar 0,3, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,5272. Skor yang lebih kecil menunjukkan semakin baik kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. Skor minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank BNI Syariah pada periode 2010-2016, kecuali pada tahun 2016 memperoleh skor sebesar 0,2. Adapun skor maksimum sebesar 0,3 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010-2012, dan Bank Panin Syariah pada tahun 2010-2011.

Indikator keempat dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.4}$ ) adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Indikator  $X_{2.4}$  nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 0,3, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,0539. Semakin rendah skor menunjukkan kinerja bank syariah semakin baik dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Nilai minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2010; Bank BNI Syariah pada tahun 2010; Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2010; Maybank Syariah pada tahun 2010; Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011-2016; Bank Panin Syariah pada tahun 2012-2014; Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2012-2013; Bank Mega Syariah pada tahun 2014-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015; dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,3 diperoleh Bank BNI Syariah pada tahun 2014 dan 2015 serta Bank Victoria Syariah pada tahun 2016.

Indikator kelima dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.5}$ ) adalah pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Indikator  $X_{2.5}$  memiliki nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,0919. Skor semakin rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa semakin baik. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 dan 2016; Bank Panin Syariah pada tahun 2011-2013; Bank Mega Syariah pada tahun 2014 dan 2015; Bank BCA Syariah pada tahun 2014; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016; serta Bank BNI Syariah pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 diperoleh Bank Victoria dan Bank BCA Syariah pada tahun 2010, serta Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016.

Indikator keenam dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami adalah penanganan benturan kepentingan. Indikator  $X_{2.6}$  memiliki nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 0,41, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,1795. Sebagaimana indikator-indikator sebelumnya, semakin rendah skor indikator ini menunjukkan bahwa penanganan benturan kepentingan di bank syariah semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi skor menunjukkan penanganan benturan kepentingan semakin tidak baik. Nilai minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2010 dan 2016; Bank BNI Syariah pada tahun 2011, 2012, 2015, 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2011-2013; Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011-2016 ; Bank Panin Syariah pada tahun 2012; Bank BCA Syariah pada tahun 2013-2016; Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2015; Bank Mega Syariah pada tahun 2016; dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,41 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2014.

Indikator ketujuh dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.7}$ ) adalah penerapan fungsi kepatuhan Bank. Indikator  $X_{2.7}$  mempunyai nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,091. Semakin rendah skor indikator ini menunjukkan semakin baik penerapan fungsi kepatuhan di bank syariah. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 dan 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2012-2013, Bank BNI Syariah pada tahun 2013-2015; Bank BCA Syariah pada tahun 2014-2016; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016; dan Bank Panin Syariah pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2010; dan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2010-2011 serta 2014-2016.

Indikator kedelapan dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.8}$ ) adalah penerapan fungsi audit intern. Diketahui bahwa indikator  $X_{2.8}$  memiliki nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,0984. Semakin rendah skor indikator ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit intern di bank syariah semakin baik. Nilai minimum sebesar 0,05 yang menunjukkan kinerja yang paling baik dalam hal penerapan fungsi audit internal diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, 2015, dan 2016; Bank Mega Syariah pada tahun 2011 dan 2012; Bank BNI Syariah pada tahun 2013 dan 2014; Bank BCA Syariah pada tahun 2015 dan 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 yang menunjukkan kinerja yang kurang baik diperoleh Bank Panin Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2010, dan Maybank Syariah pada tahun 2012.

Indikator kesembilan dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.9}$ ) adalah penerapan fungsi audit ekstern. Indikator  $X_{2.9}$  menghasilkan nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,135, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,0675. Nilai indikator yang lebih kecil menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern di bank syariah semakin baik. Sebagian besar bank syariah memperoleh nilai sebesar 0,05 seperti Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Maybank Syariah memperoleh skor sebesar 0,1 pada periode 2010-2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,135 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2016.

Indikator kesepuluh dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.10}$ ) adalah Batas Maksimum Penyaluran Dana. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa ( $X_{2.10}$ ) nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,22, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,0802. Semakin rendah skor dari indikator kesepuluh ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin baik dalam hal batas maksimum penyaluran dana. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2010-2013; Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2010-2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,2200 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2015 dan 2016.

Indikator kesebelas dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_{2.11}$ ) adalah Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Indikator  $X_{2.11}$  memiliki nilai minimum sebesar 0,15, nilai maksimum sebesar 0,45, dan rata-rata (*mean*) sebesar 0,2807. Semakin kecil skor dari indikator kesebelas ( $X_{2.11}$ ) menunjukkan bahwa semakin transparan kondisi keuangan dan non keuangan serta semakin baik pelaporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Nilai minimum sebesar 0,15 banyak diperoleh bank syariah pada periode 2012-2016 diantaranya diperoleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2012-2016, Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2013, dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012-2013. Selanjutnya, skor sebesar 0,15 juga diperoleh Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013. Adapun nilai maksimum sebesar 0,45 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2016.

#### Deskripsi Variabel Tingkat Agresivitas Pajak

Statistik deskriptif variabel Tingkat Agresivitas Pajak ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Agresivitas Pajak

Indikator	n	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Y <sub>1.1</sub>	77	0	3,206	0,4203	0,6495
Y <sub>1.2</sub>	77	-1,3126	2,9144	0,3563	0,638
Y <sub>1.3</sub>	77	-0,2974	0,5725	0,2567	0,1131
Y <sub>1.4</sub>	77	-0,314	0,629	0,2544	0,1541
Y <sub>1.5</sub>	77	-0,139	2,1226	0,2826	0,2669

Indikator pertama dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah beban pajak kini ( $Y_{1.1}$ ). Diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 3,20601, dan nilai rata-rata sebesar 0,4203046. Nilai minimum sebesar 0 diperoleh beberapa bank syariah diantaranya Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin Syariah pada tahun 2010, Bank Victoria Syariah pada tahun 2011, Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah pada tahun 2015, serta Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah pada tahun 2016. Skor sebesar 0 terjadi karena bank syariah memiliki beban pajak kini (*current tax expense*) sebesar 0 (nihil) dan disebabkan karena laba fiskal yang negatif. Adapun nilai maksimum sebesar 3,20601 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012. Bank Syariah Mandiri juga memperoleh skor tinggi sebesar 1,98460 pada tahun 2010; 2,07954 pada tahun 2011; dan 2,55966 pada tahun 2013. Selain itu, Bank Mega Syariah juga memperoleh skor tinggi sebesar 2,30011 pada tahun 2012.

Indikator kedua dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah beban pajak ( $Y_{1.2}$ ). Diketahui bahwa nilai minimum sebesar -1,3126, nilai maksimum sebesar 2,9144, dan nilai rata-rata sebesar 0,356281. Nilai minimum sebesar -1,3126 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2016. Beban pajak (*tax expense*) negatif menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah memiliki beban pajak kini (*current tax expense*) nihil dan penghasilan pajak tangguhan (*deffered tax income*) sebesar Rp131.263.251.000. Adapun nilai maksimum sebesar 2.9144 diperoleh Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012 karena pada tahun tersebut BSM memiliki beban pajak sebesar Rp291.442.081.821. Bank Syariah Mandiri juga memperoleh skor yang tinggi pada tahun 2013 sebesar 2,32596 karena BSM menghasilkan beban pajak sebesar Rp232.596.232.345.

Indikator ketiga dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah GETR ( $Y_{1.3}$ ). Indikator GETR dihitung dari beban pajak (*tax expense*) dibagi dengan laba akuntansi (*pre-tax book income*). Skor yang lebih tinggi dari variabel tingkat agresivitas pajak mengindikasikan

perusahaan kurang agresif dalam pembayaran pajaknya, sebaliknya skor yang lebih rendah mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar -0,2974, nilai maksimum sebesar 0,5725, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,256651. Nilai minimum sebesar -0,2974 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012. Adapun nilai maksimum sebesar 0,5725 diperoleh Bank BRI Syariah pada tahun 2014. Bank Jabar Banten Syariah juga memperoleh skor yang tinggi sebesar 0,54365 pada tahun 2015. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua bank syariah tersebut kurang agresif dalam hal pajak penghasilan.

Indikator keempat dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah CETR ( $Y_{1.4}$ ). Indikator CETR dihitung dari beban pajak kini (*current tax expense*) dibagi dengan laba akuntansi (*pre-tax book income*). Dari Tabel 5.7, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,3140, nilai maksimum sebesar 0,6290, dan nilai rata-rata sebesar 0,254387. Nilai minimum sebesar -0,3140 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012. Bank Jabar Banten Syariah juga memperoleh skor yang rendah sebesar -0,35314 pada tahun 2011. Pada tahun 2011, meskipun Bank Jabar Banten Syariah memperoleh rugi bersih secara akuntansi sebesar Rp25.769.000.000 tetapi menghasilkan beban pajak kini sebesar Rp9.100.000.000. Hal ini disebabkan pada tahun 2011, terjadi koreksi fiskal positif sehingga menghasilkan laba fiskal sebesar Rp61.577.000.000. Demikian pula pada tahun 2012, meskipun Bank Jabar Banten Syariah memiliki rugi bersih sebesar Rp21.417.000.000 tetapi menghasilkan beban pajak kini sebesar Rp6.725.000.000. Nilai maksimum sebesar 0,6290 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 karena pada tahun tersebut Bank Syariah Mandiri berhasil membukukan beban pajak kini sebesar Rp69.059.284.500 dan laba akuntansi sebesar Rp109.793.613.822. Selain Bank Syariah Mandiri, pada tahun 2014 Bank Muamalat Indonesia juga memperoleh skor yang cukup tinggi untuk indikator ini yaitu sebesar 0,62237 karena pada tahun tersebut Bank Muamalat Indonesia membukukan beban pajak kini sebesar Rp61.641.981.000 dan laba akuntansi sebesar Rp99.044.264.000.

Indikator kelima dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah FETR ( $Y_{1.5}$ ). Indikator CETR dihitung dari beban pajak (*tax expense*) dibagi dengan laba fiskal (*adjusted pre-tax income*). Skor yang lebih besar menunjukkan bahwa bank syariah kurang agresif dalam perencanaan pajaknya, sebaliknya skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi di bank syariah. Diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,1390, nilai maksimum sebesar 2,1226, dan nilai rata-rata sebesar 0,282566. Nilai minimum sebesar -0,1390 diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2016 karena pada tahun 2016 Maybank Syariah memiliki beban pajak sebesar Rp19.191.000.000 dan rugi fiskal sebesar Rp-138.047.000.000 sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 5.49. Adapun nilai maksimum sebesar 2,1226 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Bank Panin Syariah memperoleh beban pajak sebesar Rp3.177.368.000 dan laba fiskal sebesar Rp1.496.907.000.

#### *Uji Validitas Konvergen*

Berikut disajikan ringkasan hasil pengujian validitas konvergen yang menunjukkan indikator yang memenuhi validitas konvergen dengan skor *loading factor* di atas 0.4.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Tingkat Tata Kelola Islami ( $X_1$ )	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ( $X_{1.1}$ )	0.700
	Pelaksanaan tugas dan tanggung	0.781

	jawab Direksi (X <sub>1.2</sub> )	
	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (X <sub>1.3</sub> )	0.612
	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (X <sub>1.5</sub> )	0.622
	Penanganan benturan kepentingan (X <sub>1.6</sub> )	0.586
	Penerapan fungsi kepatuhan Bank (X <sub>1.7</sub> )	0.811
	Penerapan fungsi audit intern (X <sub>1.8</sub> )	0.603
	Penerapan fungsi audit ekstern (X <sub>1.9</sub> )	0.805
	Batas Maksimum Penyaluran Dana (X <sub>1.10</sub> )	0.709
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (X <sub>1.11</sub> )	0.629
Tingkat Agresivitas Pajak (Y <sub>1</sub> )	Current Tax Expense (Y <sub>1.1</sub> )	0.928
	Tax Expense (Y <sub>1.2</sub> )	0.933
	Cash effective tax rate (Y <sub>1.4</sub> )	0.460

#### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach alpha* dan *composite reliability* digunakan untuk mengukur reliabilitas model pengukuran. Ringkasan hasil pengujian reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut ini. *Rule of thumbs* dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas adalah 0.4. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil yang bagus yaitu seluruh variabel memiliki skor lebih dari *rule of thumbs* 0,40.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Tingkat Tata Kelola Islami (X <sub>1</sub> )	0.876	0.900
Tingkat Agresivitas Pajak (Y <sub>1</sub> )	0.676	0.836

#### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai *p-value*. Hipotesis penelitian diterima apabila *probability value* (*p-value*) kurang dari 0,05 atau 5%. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan	Hipotesis	<i>Inner Weight</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Hasil
Tingkat Tata Kelola Islami (X <sub>1</sub> ) → Tingkat Agresivitas Pajak (Y <sub>1</sub> )	H <sub>1</sub>	-0.375	4.049	0.000	Signifikan

Hasil pengujian pada tabel menunjukkan nilai t statistik sebesar 4.049 dengan *p value* sebesar 0.000 (<0.05). Hal ini berarti bahwa H<sub>1</sub> diterima. Nilai koefisien *inner weight* sebesar

-0.375 menunjukkan bahwa tingkat tata kelola Islami ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hasil tabel menunjukkan bahwa semakin tinggi skor tingkat tata kelola Islami akan menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dimana hal tersebut menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin rendah implementasi tingkat tata kelola Islami akan menghasilkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin baik implementasi tata kelola Islami akan memberikan dampak menurunnya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan bank syariah. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat tata kelola Islami mengakibatkan bank umum syariah semakin agresif melakukan upaya meminimalkan pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin baik implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat menurunkan tingkat agresivitas pajaknya.

### *Pembahasan*

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian saat ini menemukan bahwa semakin buruk tata kelola Islami yang diindikasikan dengan skor tingkat tata kelola Islami yang lebih tinggi akan menghasilkan beban pajak, beban pajak kini, dan tarif pajak efektif yang semakin rendah. Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Sebaliknya, semakin baik tata kelola Islami yang diindikasikan dengan skor tingkat tata kelola Islami yang rendah akan memberikan dampak pada menurunnya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa struktur tata kelola memungkinkan monitoring untuk mengendalikan perilaku oportunistik dari agen (Eisenhardt, 1989; Anderson & Reeb, 2004; Chrisman dkk., 2007). Dalam konteks penelitian ini, tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat berperan sebagai media yang efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik dari wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi tidak agresif dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.

Di samping itu, hasil penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi peran teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan tingkat tata kelola Islami dan tingkat agresivitas pajak. Teori legitimasi menyatakan bahwa agar sebuah entitas diterima dan mendapatkan pengesahan dari masyarakat, maka entitas tersebut harus melakukan tindakan yang sesuai dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat (Bitektine, 2011). Dalam konteks penelitian ini, perusahaan dengan tingkat tata kelola yang baik berupaya untuk membayar beban pajak yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat karena tindakannya tersebut sesuai dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan yang dibangun secara sosial. Legitimasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pajak ini diistilahkan dengan legitimasi sosio-politik sebagaimana dijelaskan Aldrich & Fiol (1994) serta Suchman (1995) yang mengacu pada apakah ciri, atribut, dan hasil organisasi dari aktivitas mereka terhadap norma sosial dapat diterima atau tidak secara sosial dan menyebabkan organisasi diberi sanksi sampai mengubah perilaku mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang dilakukan Boussaidi & Hamed (2015); Zemzem & Ftouhi (2013); serta Richardson, Taylor, & Lanis (2013). Studi Boussaidi & Hamed (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia. Bila studi Boussaidi & Hamed (2015) menggunakan indikator kepemilikan manajerial untuk mengukur tingkat tata kelola dan memberikan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini saat ini juga mendukung studi Zemzem & Ftouhi (2013) yang berhasil membuktikan secara empiris pengaruh positif ukuran dewan terhadap tarif pajak efektif

(*effective tax rate*) artinya semakin besar ukuran dewan dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan memberikan dampak pada tarif pajak efektif yang lebih besar. Tarif pajak efektif yang lebih besar menunjukkan bank syariah kurang agresif dalam meminimalkan pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin kurang baik pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah yang berarti bank syariah lebih agresif dalam meminimalkan pajak penghasilan. Hasil penelitian saat ini juga mendukung studi Richardson, Taylor, & Lanis (2013) yang berhasil menemukan pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia.

Hasil penelitian saat ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang tidak berhasil membuktikan secara empiris pengaruh ukuran komisaris independen dan komite audit terhadap tingkat agresivitas pajak diantaranya studi Hanum & Zulaikha (2013) serta Khaoula & Ali (2012). Bila pada penelitian Hanum & Zulaikha (2013) menguji pengaruh ketiga karakteristik tata kelola yang meliputi: komisaris independen, komite audit, dan pemegang saham institusional sedangkan pada penelitian ini menambahkan direksi, dewan pengawas syariah, dan beberapa lainnya. Demikian pula studi Khaoula & Ali (2012), tidak berhasil membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan dan diversitas gender terhadap tingkat agresivitas pajak.

Hasil penelitian saat ini didukung dengan data tingkat tata kelola Islami selama 7 (tujuh) tahun terakhir periode 2010-2016. Rata-rata penurunan skor tingkat tata kelola Islami adalah sebesar -0,01283 setiap tahun. Hal ini berarti bahwa tata kelola Islami di bank syariah menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2010, rata-rata skor tata kelola Islami sebelas bank syariah menunjukkan angka 1,83955 dan menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,691548.

## **Simpulan, Saran dan Implikasi**

### *Simpulan*

Hasil penelitian ini membuktikan pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin baik implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dijalankan bank syariah. Sebaliknya, semakin buruk implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah, semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik merupakan mekanisme yang efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik agen. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi peran teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara tingkat tata kelola Islami dan tingkat agresivitas pajak.

### *Saran*

Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas penelitian saat ini pada aspek objek penelitian, variabel dan indikator penelitian. Penelitian mendatang dapat memperluas objek pada entitas syariah selain bank umum syariah seperti unit usaha syariah, koperasi syariah, baitul maal wat tamlik (BMT), asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan seperti kinerja keuangan dan kinerja maqashid syariah dalam objek di entitas syariah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator *Fiscal Effective Tax Rate* (FETR) sebagai indikator baru untuk mengukur variabel tingkat agresivitas pajak. Indikator ini tidak digunakan dalam penelitian ini karena berdasarkan uji struktural dengan

menggunakan *software* SmartPLS memiliki validitas konvergen di bawah 0,5 sehingga harus dikeluarkan dalam pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur tingkat tata kelola Islami yaitu keberadaan anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota DPS, keberadaan lintas anggota DPS, kualifikasi doktor bagi anggota DPS, dan reputasi anggota DPS sebagaimana studi Farook dan Lanis (2005) serta Farook dkk. (2011).

### **Daftar Pustaka**

- Aldrich, H. E., & Fiol, C. M. (1994). Fools rush in? The Institutional context of industry creation. *Academy of Management Review*, 19(4), 645-670.
- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2004). Board composition: Balancing family influence in S&P 500 firms. *Administrative Science Quarterly*, 49(2), 209-237.
- Badertscher, B.A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56, 228-250.
- Badjuri, A. (2011). Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme *Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 38-54.
- Berete, M. (2011). Relationship between corporate social responsibility and financial performance in the pharmaceutical industry. *Dissertation Abstracts International:Section A. Humanities and Social Sciences*, 72(08). (UMI No. 3457470)
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: empirical evidence from Tunisian context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Cheng, A., Huang, H., Ying, L., & Stanfield, J. (2012). The effect of hedge fund activism on corporate tax avoidance? *The Accounting Review*, 87, 1493-1526.
- Chrisman, J. J., Chua, J. H., Kellermanns, F. W., & Chang, E. P. (2007). Are family managers agents or stewards? An exploratory study in privately held family firms. *Journal of Business Research*, 60(10), 1030-1038.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, R. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Dienes, D., & Velte, P. (2016). The Impact of Supervisory Board Composition on CSR Reporting: Evidence from the German Two-Tier System. *Sustainability*, 8(63), 1-20.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implication. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Fama, E., & M. Jensen. (1983). Agency Problem and Residual Claims. *Journal of Law and Economics*, 26, 327-349.
- Farook, S. & Lanis, R. (2005). Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. <http://www.afaanz.org/web2005/papers>.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.

- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K., (1987). *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice-Hall International, USA.
- Gunarsih, Tri. (2003). *Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance*. Kompak Nomor 8.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-10.
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Hogner, R. H., (1982). Corporate social reporting: 8 decades of development at US Steel, *Research in Corporate Social Performance and Policy*, 4, 243-250.
- Indrawaty & Wardayati, S. M. (2015). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *3rd Global Conference on Business and Social Science*, 16-17 December, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost & Ownership Structure. *Journal of Finance Economics*, 3(4), 305-360.
- Khaoula, A., & Ali, Z. M. (2012). Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning in American Firms. *Business Management and Strategy*, 3(1): 72-86.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *JAAI*, 19(2): 126-136.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal Accounting Public Policy*, 30(1): 50-70.
- Lehman, C. (1983). Stalemate in Corporate Social Responsibility Research, *American Accounting Association Public Interest Section*, Working Paper.
- Lindblom, C. K. (1983). The concept of organisational legitimacy and its implications for corporate social responsibility disclosure. *American Association Public Interest Section*, Working paper.
- Nurkhin, A. (2010). *Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 46-55.
- Othman, R., Thani, A. Md., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4-20.
- Othman, R., & Thani, A. Md. (2010). Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 9(4): 135-144.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness. *J. Account. Public Policy*, 3(2): 68-88.
- Sartaji, A., & Hassanzadeh, M. (2014). Investigation the Relationship Between Corporate Governance and Tax Violations in Tehran Stock Exchange. *International Journal of Accounting Research*, 1(12): 77-85.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research methods for business: A skill building approach*, Wiley-India.
- Suchman, M. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20, 571-610.
- Sunarto, C. N. (2016). Shariah Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1): 30-57.
- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). Pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan terdaftar di BEI. *Kompertemen*, 15(1), 12-25.

Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4): 140-147.